LAPORAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi dalam kurun waktu tahun 2021 sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta Rencana Strategis Tahun 2017-2021. Pada Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan agar penyusunan dan kinerja berikutnya lebih baik lagi.

Batam, Januari 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM

PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERHUBUNGAN

SALIM, S.SoS., MSI
NIP. 19681021 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI.....

DAFTAR TABEL .....

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Maksud dan Tujuan 2

1.3. Gambaran Umum Organisasi 3

1.4. Sistematika Penyajian LKjIP 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA 17

2.1. Visi dan Misi 18

2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 18

2.3. Program dan Kegiatan 20

2.4. Rencana Kinerja Tahun 2021 21

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26

3.1. Capaian Kinerja 26

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021 27

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan tahun-tahun Sebelumnya 30

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Perhubungan 32

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021 ….. 33
3.2.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan dan Solusi …… 33
3.2.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM) …… 36
3.2.3. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja … 39
3.3. Realisasi Anggaran …… 60

BAB IV PENUTUP ……. 61

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.	Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan Kota Batam Menurut Tingkat Pendidikan ……	18
Tabel II.2.	Rencana Kinerja Tahun 2021 ……	22
Tabel II.3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ……..	25
Tabel III.4.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 ……..	30
Tabel III.5.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya ……	31
Tabel III.6.	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan saat Ini pada Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam …	32
Tabel III.7.	Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2021 ….	36
Tabel III.8.	Realisasi Anggaran Tahun 2021 ……	61

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem pertanggungjawaban berbentuk pengukuran kinerja merupakan salah satu sisi penting dari pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan, program, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Oleh karena itu setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja dapat dikategorikan sebagai laporan rutin, karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Batam diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian

kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Namun Tahun 2021 merupakan tahun peralihan terkait nama program dan kegiatan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tahun 2021 Pemerintah Kota Batam sudah menerapkan nama program dan kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dimana harus dilakukan *mapping* terkait indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021.

Tahun 2021 juga merupakan tahun akhir penerapan RPJMD dan Renstra periode sebelumnya dan tahun awal penerapan periode berikutnya, sehingga indikator kinerja untuk tahun 2021 ada pada RPJMD dan Renstra periode tahun 2016-2021 dan periode tahun 2021-2026.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan disusunnya LKjIP adalah :

Maksud :

a. Sebagai pertanggungjawaban secara tertulis Dinas Perhubungan Kota Batam kepada Walikota Batam selaku pemberi kewenangan
b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Batam
c. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan atau tingkat kegagalan capaian pelaksanaan suatu kegiatan dan program kerja Dinas Perhubungan Kota Batam

Tujuan :

a. Mewujudkan pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Batam
b. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja perencanaan kegiatan/program maupun pemberdayaan sumber daya di Dinas Perhubungan Kota Batam
c. Menyediakan laporan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan
d. Perbaikan dalam perencanaan, beberapa perencanaan jangka menengah dan pendek.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam No. 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang perhubungan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan Laut

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Lalu Lintas, Angkutan jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan laut.
c. pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Lalu Lintas, Angkutan jalan, Prasarana Perhubungan, dan Angkutan laut.
d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

a. menetapkan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan kebijakan umum Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan jalan, Bidang Prasarana Perhubungan, Bidang Angkutan Laut dan Unit Pelaksana Teknis serta Kelompok Jabatan Fungsional;
c. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
d. membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara memberikan reward and punishment untuk meningkatkan produktivitas kerja;
e. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai ketentuan perundangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
f. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

h. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya;

i. merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan Perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

j. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;

k. merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Dinas;

l. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penyelesaian administrasi penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Dinas;

m. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Dinas;

n. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas kepada para Kepala Bidang;

o. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;

p. menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, bendaharawan penerima, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu bendaharawan penerima sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas;

q. melaporkan Akuntabilitas Kinerja Dinas;

r. menyelenggarakan proses perizinan dan non perizinan lingkup perhubungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

s. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

t. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Prasarana Perhubungan, Bidang Laut sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas; dan

v. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris, 4 Kepala Bidang dan 2 UPT, yang terdiri dari :

1. Sekretariat
2. Bidang Lalu Lintas
3. Bidang Angkutan
4. Bidang Laut
5. Bidang Prasarana
6. UPT Pelayanan Jasa Transportasi
7. UPT Pelayanan Parkir

A. SEKRETARIAT

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengoordinasian tugas-tugas di Bidang.

Fungsi :

a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana kerja Dinas;
b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset;
d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan

e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

B. BIDANG LALU LINTAS

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Lalu Lintas.

Fungsi :

a. penyusunan rencana dan program lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas, pengawasan dan penertiban lalu lintas;
b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas, pengawasan dan penertiban lalu lintas;
c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas, pengawasan dan penertiban lalu lintas; dan
d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Lalu Lintas.

D. BIDANG ANGKUTAN JALAN

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Angkutan Jalan.

Fungsi :

a. penyusunan rencana dan program lingkup angkutan orang, angkutan barang dan pengujian kendaraan bermotor;

b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup angkutan orang, angkutan barang dan pengujian kendaraan bermotor;
c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang angkutan orang, angkutan barang dan pengujian kendaraan bermotor; dan
d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan angkutan orang, angkutan barang dan pengujian kendaraan bermotor.

E. BIDANG PRASARANA PERHUBUNGAN

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Prasarana Perhubungan.

Fungsi :
a. penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan teknis, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta prasarana perhubungan;
b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan teknis, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta prasarana perhubungan;
c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan teknis, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta prasarana perhubungan; dan
d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan teknis, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta prasarana perhubungan.

F. BIDANG LAUT

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Laut.

Fungsi :

a. penyusunan rencana dan program lingkup kepelabuhanan, penunjang keselamatan pelayaran, serta lalu lintas angkutan laut;
b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup kepelabuhanan, penunjang keselamatan pelayaran, serta lalu lintas angkutan laut;
c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi serta urusan pemerintahan daerah bidang kepelabuhanan, penunjang keselamatan pelayaran, serta lalu lintas angkutan laut; dan
d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kepelabuhanan, penunjang keselamatan pelayaran, serta lalu lintas angkutan laut.

G. Unit Pelaksanan Teknis Pelayanan Jasa Transportasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2018 mempunyai;

Tugas : melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.

Uraian Tugas :

a. menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;

b. membuat usulan kebutuhan operasional kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
c. membuat petunjuk teknis operasional pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
d. melaksanakan pengendalian teknis terkait kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
f. melaksanaan penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasional pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
g. melaksanakan administrasi teknis kepegawaian, ketatalaksanaan terkait pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
h. melaksanakan pengaturan tugas pelayanan, penempatan personil di UPTD;
i. melaksanakan tata kelola teknis rumah tangga dan perlengkapan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;
j. melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP) pelayanan jasa transportasi;
k. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengelolaan pelayanan jasa transportasi;

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;

m. menghimpun, memproses dan mengadministrasikan data hasil kegiatan pengelolaan pelayanan jasa transportasi;

n. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala Dinas; dan

o. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja, keteknisan UPTD.

H. Unit Pelaksanan Teknis Pelayanan Parkir

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2018, mempunyai:

Tugas : melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaskanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.

Uraian Tugas :

a. menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;

b. membuat usulan kebutuhan kegiatan pengawasan pelayanan parkir rutin tahunan;

c. membuat perencanaan teknis operasional tata kelola pelayanan parkir;

d. melaksanakan tugas di bidang pelayanan parkir;

e. melaksanakan penataan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan parkir tepi

jalan umum dan tempat khusus parkir yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

f. melaksanakan fasilitasi pelayanan parkir;
g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan lokasi tempat parkir dan menindaklanjuti proses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir khusus oleh orang atau badan;
h. melaksanakan, pembinaan dan pengawasan kelayakan sarana prasaran parkir serta penertiban dan pengamanan tempat parkir;
i. melaksanakan pemungutan retribusi parkir;
j. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP);
k. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup Pengelolaan pelayanan parkir;
l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan pelayanan parkir;
m. menghimpun dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup pengelolaan pelayanan parkir;
n. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala Dinas; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas teknis operasional penunjang UPTD.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
TAHUN 2017

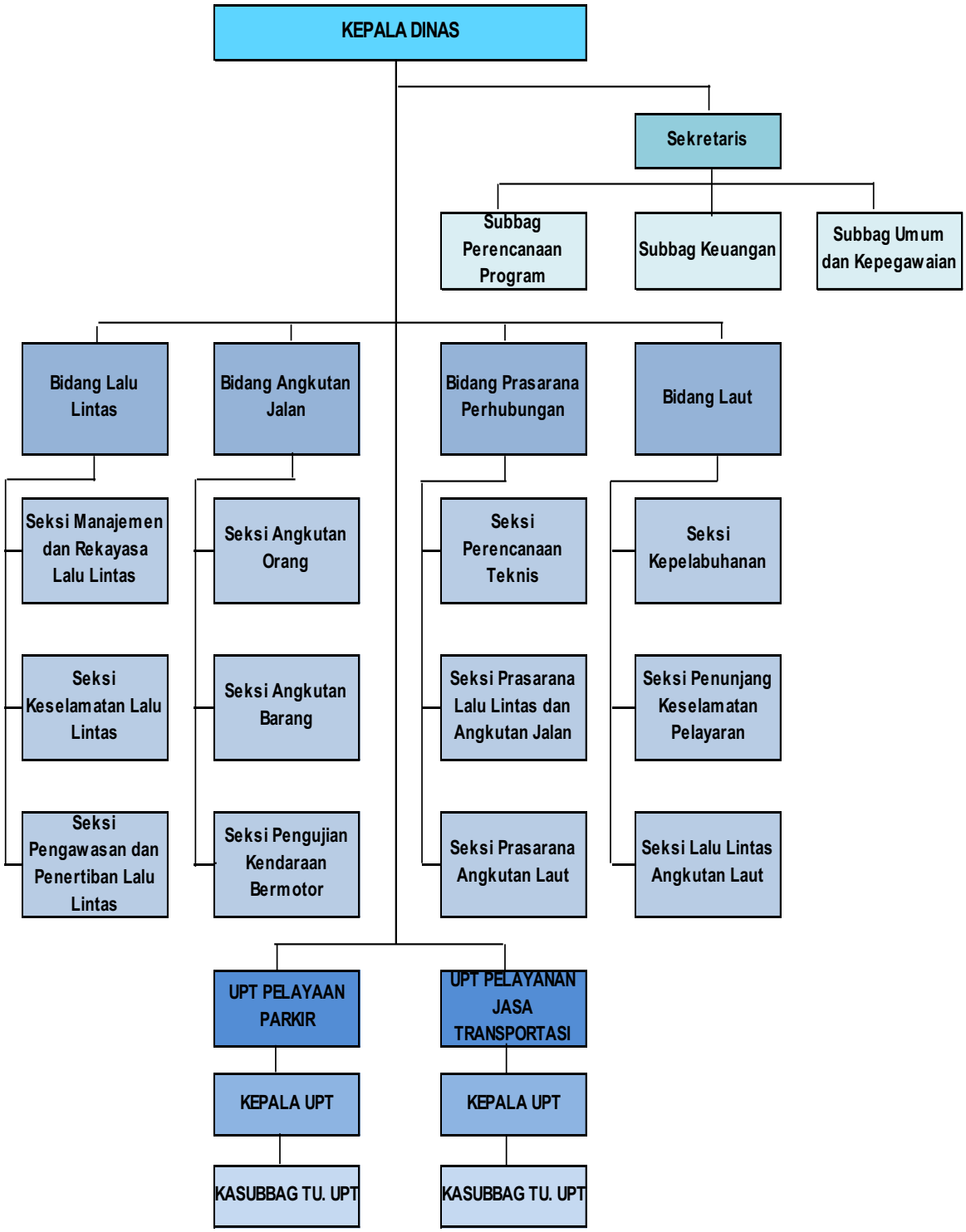

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan kota Batam didukung oleh personel /SDM yang sebagian besar berpendidikan sarjana. Hal ini merupakan salah satu pendorong dan motivasi untuk menciptakan budaya kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan per Desember 2021 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel I.1
Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan Kota Batam
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	Diploma 3	Diploma 4	S1	S2	
	PNS								
1	Sekretariat			4	2		5	3	14
2	Bidang Laut			2	1	1	4	3	11
3	Bidang Prasarana	1		1			4	2	8
4	Bidang Lalu Lintas			3	2	1	4	1	11
5	Bidang Angkutan			6	2		8		16
6	UPT Parkir			3		1	1		5
7	UPT Trans			1	1		3	1	6
JUMLAH PNS									**71**
	THL								
1	Sekretariat			7	3	1	5		16
2	Bidang Laut			3	1	1			5
3	Bidang Prasarana			3	2		1		6
4	Bidang Lalu Lintas			7			4		11
5	Bidang Angkutan	1		5	2		3		11
6	UPT Parkir		1	14	1		2		18
7	UPT Trans	3	6	137	1		28		175
JUMLAH THL									**242**

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam selama tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) 2021 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.

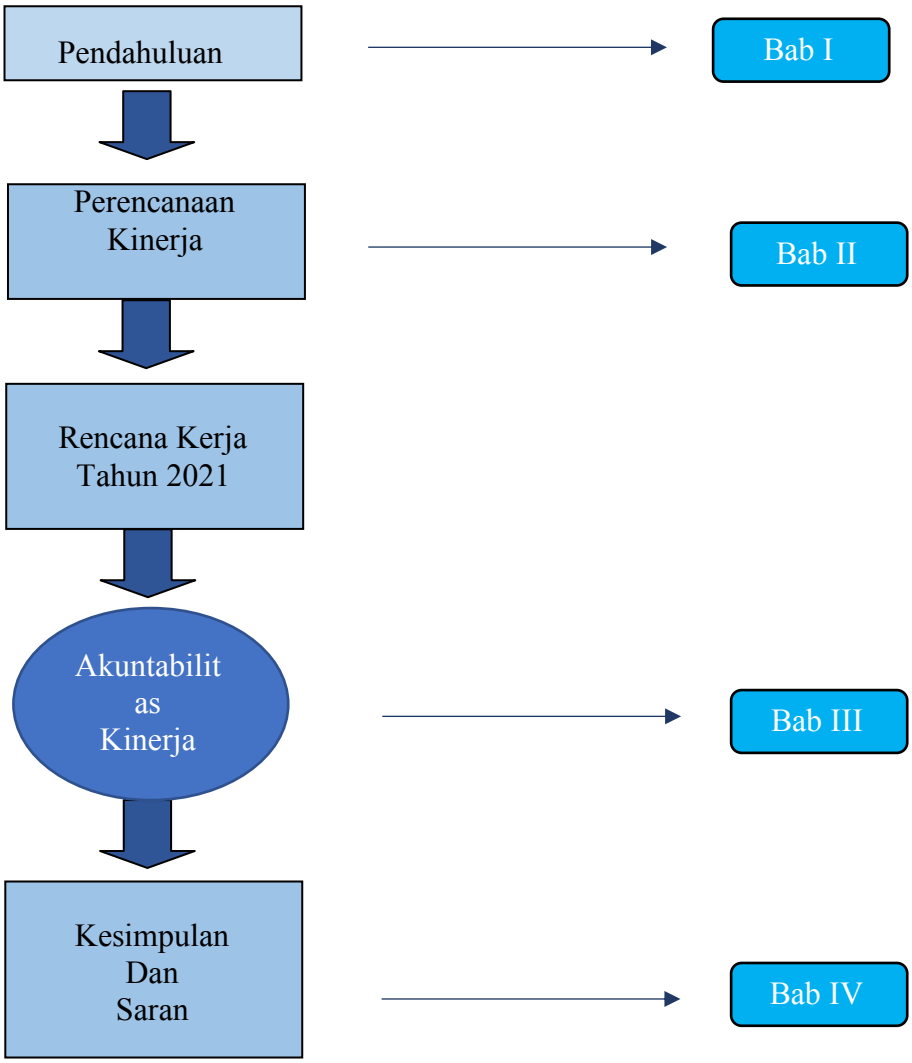

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dalam menyusun Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021 ini, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengingat tahun 2021 merupakan tahun peralihan antara RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) antara 2 (dua) periode, yaitu peroide 2016-2021 dan periode 2021-2026, sehingga terdapat 2 (dua) indikator kinerja sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih, namun pelaksanaan penyusunan laporan kinerja tahun 2021 masih mengacu pada Indikator Kinerja yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2016-2021 sebagaimana Perjanjian Kinerja Kepala Dinas tahun 2021.

Dalam penganggaran tahun 2021 ini nama program dan kegiatan sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sedangkan sesuai Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2016-2021 Indikator Kinerja masih mengacu pada program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sehingga harus dilaksanakan *mapping*.

2.1. VISI DAN MISI

Visi Dinas Perhubungan Kota Batam periode 2016-2021

"Terwujudnya Sistem Transportasi yang Berkualitas di Kota Batam"

Misi Dinas Perhubungan Kota Batam periode 2016-2021

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Perhubungan Kota Batam periode 2016-2021 dilaksanakan misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia perhubungan yang profesional dalam memberikan pelayanan prima
2. Mengembangkan sistem pelayanan perhubungan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
3. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Mewujudkan layanan transportasi yang selamat, lancar, aman, nyaman, terjangkau dan terintegrasi
5. Mewujudkan transportasi yang berkesinambungan dan ramah lingkungan.

2.2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Selanjutnya Misi dijabarkan kedalam tujuan, tujuan adalah hal yang hendak dicapai secara spesifik dalam waktu 5 tahun dan terukur, yang dituangkan dalam sasaran-sasaran atau target absolute atau relative dalam bentuk kuantitatifnya yang hendak dicapai dalam waktu 5 tahun.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan

pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran Dinas Perhubungan yaitu :

1. Terlaksananya pelayanan parkir dan transportasi jalan yang aman dan nyaman
2. Tersedianya Transportasi massal yang berkesinambungan dan terjangkau oleh masyarakat
3. Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Darat dan Laut
4. Tersedianya akses ke wilayah hinterland

Penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator sasaran Dinas Perhubungan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Persentase Titik lokasi parkir yg sudah dikelola
2. Tingkat Keamanan dan kenyamanan transportasi Jalan
3. Persentase layanan angkutan darat dan laut
4. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun
5. Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpelihara
6. Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran
7. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota.

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Kegiatan Administrasi Keuangan
    2. Kegiatan Administrasi Umum
    3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

6. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
    1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
    2. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
    3. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
    4. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaLu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota
    5. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
    6. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pelayaran
    1. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
    2. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

2.4. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2016-2021.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program, dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan, program, dan kegiatan yang dituangkan dalam formulir Rencana Strategis (RS) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam rencana kinerja tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome. Komponen rencana kinerja memuat tujuan, program, sasaran/kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome.

Dinas Perhubungan Kota Batam pada tahun 2021 telah menetapkan 14 kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah dtetapkan di Renstra. Adapun Target Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel.II.2
Rencana Kinerja Tahun 2021
Dinas Perhubungan Kota Batam

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Terlaksananya pelayanan parkir dan transportasi jalan yang aman dan nyaman**	**Persentase Titik lokasi parkir yg sudah dikelola**	**87%**	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.445.964.000,00
		Tingkat Keamanan dan kenyamanan transportasi Jalan	**90%**	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.177.113.000,00
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	152.000.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
2	**Tersedianya Transportasi massal yang berkesinambungan dan terjangkau oleh masyarakat**	**Persentase layanan angkutan darat dan laut**	**65%**	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.587.158.320
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	1.696.319.000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	6.382.731.617,00
3	**Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Darat dan Laut**	**Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun**	**65%**	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.308.602.126
		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpelihara	**60%**	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaLu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	6.357.739.822
4	**Tersedianya akses ke wilayah hinterland**	**Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran**	**90%**	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	926.812.013
5	**Tersedianya Aparatur yang profesional dan handal**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.423.029.896,00
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	346.100.000,00
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.628.719.900,00
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	**100%**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.400.000,00
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	973.760.664,00

2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan Demikian, Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja yang telah dicanangkan pada awal tahun 2021 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam tahun 2021 dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelakasanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 dengan tetap mengacu pada RPJMD tahun 2016- 2021.

Adapun mengenai rincian sasaran, indikator kinerja , target dan anggaran tertera Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kota Batam yaitu :

Tabel.II.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Dinas Perhubungan Kota Batam

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1	*2*	*3*	*4*
1	Tersedianya Aparatur yang profesional dan handal	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100%
2	Terlaksananya pelayanan parkir dan transportasi jalan yang aman dan nyaman	Persentase Titik lokasi parkir yg sudah dikelola	87%
		Tingkat Keamanan dan kenyamanan transportasi Jalan	90%
3	Tersedianya Transportasi massal yang berkesinambungan dan terjangkau oleh masyarakat	Persentase layanan angkutan darat dan laut	65%
4	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Darat dan Laut	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	65%
		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpelihara	60%
5	Tersedianya akses ke wilayah hinterland	Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	100%
		Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelapor [LkjIP]. Sistem pertanggungjawaban dilakukan secara periodik yaitu dilakukan pertahun kegiatan.

Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021 ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021.

Dengan demikian , maka akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021.

3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah diterbitkan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) maupun dampak

(Impacts). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Pada Pengukuran Kinerja dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja output dan outcome inilah yang digunakan sebagai dasar pengukuran capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam untuk mencapai tujuan, sasaran dan program dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Batam.

Selanjutnya pengukuran capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam yang mengacu pada sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra 2016- 2021 yang dalam hal ini masing- masing indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021

Untuk Tahun 2021 ini Realisasi program/kegiatan tidak dapat menunjukkan pemenuhan target hasil/keluaran yang direncanakan, mengingat pada tahun 2021 ini Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masih melanda dunia, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah wabah global yang berdampak buruk pada dimensi manusia dan sosial. Setelah menyebar dari cina, pandemi meluas dengan cepat ke 210 negara termasuk Indonesia.

Kondisi tersebut mengakibatkan pemerintah harus melakukan penghematan belanja dan meningkatkan efisiensi belanja untuk

mendukung proses penanganan dan dampak *COVID-19*. Total pagu dana dalam renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam mengalami penurunan sebesar Rp.4.815.832.371,00 atau 8,38% dari pagu dana pada APBD Murni sebesar Rp.57.436.282.729,00 menjadi 52.620.450.358,00 pada APBD Perubahan. Hal ini tentu saja berdampak terhadap hasil kinerja yang dilaksanakan terutama kinerja terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Dengan kondisi tersebut secara keseluruhan realisasi pengukuran kinerja pada tahun 2021 tidak memenuhi target yang diharapkan. Capaian kinerja Dinas Perhubungan berdasarkan Perjanjian Kinerja atau Indikator Kinerja dapat disampaikan sebagai berikut:

- Untuk indikator kinerja sasaran ***Persentase Titik lokasi parkir yg sudah dikelola*** dengan target 87% dapat direalisasi sebesar 82%, dengan jumlah titik parkir yang dikelola sebanyak 542 titik lokasi parkir.
- Untuk indikator kinerja sasaran ***Tingkat Keamanan dan kenyamanan transportasi Jalan*** dengan target 90% dapat direalisasi sebesar 65%, dengan capaian 72%.
- Untuk indikator kinerja sasaran ***Persentase layanan angkutan darat dan laut*** dengan target 65% dapat direalisasi sebesar 38%, dengan demikian hasil yang dicapai tidak memenuhi target.

- Untuk indikator kinerja sasaran ***Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun*** dengan target 65% dapat direalisasi sebesar 41%, dengan capaian 63%.
- Untuk indikator kinerja sasaran ***Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpelihara*** dengan target 60% dapat direalisasi sebesar 39%, dengan demikian hasil yang dicapai tidak memenuhi target.
- Untuk indikator kinerja sasaran ***Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran*** dengan target 100%, dan realisasi sampai dengan tahun 2021 sebesar 89%, namun untuk tahun 2021 Dinas Perhubungan hanya melaksanakan pekerjaan rehabilitasi dermaga dan tidak ada pekerjaan membangun dermaga.
- Untuk indikator kinerja sasaran ***Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota*** dengan target 100%, dan realisasi sampai dengan tahun 2021 sebesar 133%, dimana kapal yang telah selesai dibangun sampai dengan tahun 2021 sebanyak 12 unit dari 9 unit yang dianggarkan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL III. 4
Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Terlaksananya pelayanan parkir dan transportasi jalan yang aman dan nyaman	Persentase Titik lokasi parkir yg sudah dikelola	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	87%	82%	94%
		Tingkat Keamanan dan kenyamanan transportasi Jalan		90%	65%	72%
2	Tersedianya Transportasi massal yang berkesinambungan dan terjangkau oleh masyarakat	Persentase layanan angkutan darat dan laut		65%	38%	58%
3	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Darat dan Laut	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	65%	41%	63%
		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpelihara		60%	39%	65%
4	Tersedianya akses ke wilayah hinterland	Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran	100%	89%	89%
		Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota		100%	133%	133%

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

Selama Tahun 2021, telah dilaksanakan kegiatan yang terkait dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam. Pandemi covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Secara umum Dinas Perhubungan Kota Batam belum dapat memenuhi target dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja, yang ditetapkan untuk masing- masing sasaran.

Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak- pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran, evaluasi, dan realisasi sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel III.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya
Dinas Perhubungan Kota Batam

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
			REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI	CAPAIAN %	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	6	7	6	7	6	7
1	Terlaksananya pelayanan parkir dan transportasi jalan yang aman dan nyaman	Persentase Titik lokasi parkir yg sudah dikelola	80%	98%	78%	94%	82%	94%
		Tingkat Keamanan dan kenyamanan transportasi Jalan	70%	82%	70%	78%	65%	72%
2	Tersedianya Transportasi massal yang berkesinambungan dan terjangkau oleh masyarakat	Persentase layanan angkutan darat dan laut	54%	96%	33%	55%	38%	58%
3	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Darat dan Laut	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	69%	117%	59%	91%	41%	63%
		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpelihara	40%	100%	40%	80%	39%	65%
4	Tersedianya akses ke wilayah hinterland	Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	89%	100%	89%	94%	89%	89%
		Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota	133%	150%	133%	133%	133%	133%

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam RENSTRA Dinas Perhubungan

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kota Batam dilakukan pembandingan antara target kinerja jangka menengah yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai Dinas Perhubungan sampai saat ini. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak- pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dan evaluasi kedepan untuk memperbaiki kinerja Dinas guna mencapai hasil yang diinginkan. Hasil pengukuran, evaluasi, dan realisasi sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III.6
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan saat ini pada Renstra
Dinas Perhubungan Kota Batam

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD	REALISASI KINERJA SASARAN						KONDISI AKHIR RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2	Terlaksananya pelayanan parkir dan transportasi jalan yang aman dan nyaman	Persentase Titik lokasi parkir yg sudah dikelola	38%	47%	50%	83%	80%	78%	82%	82%
		Tingkat Keamanan dan kenyamanan transportasi Jalan	76%	37%	36%	34%	70%	70%	65%	65%
3	Tersedianya Transportasi massal yang berkesinambungan dan terjangkau oleh masyarakat	Persentase layanan angkutan darat dan laut	70%	24%	47%	52%	54%	33%	38%	38%
4	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Darat dan Laut	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun	28%	42%	63%	65%	69%	59%	41%	41%
		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpelihara	16%	38%	42%	42%	40%	40%	39%	39%
5	Tersedianya akses ke wilayah hinterland	Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	64%	76%	81%	86%	89%	89%	89%	89%
		Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota	44%	44%	78%	133%	133%	133%	133%	133%

3.2. EVALUASI DAN ANALISI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pada dasarnya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam selama Tahun 2021. Capaian kinerja tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Batam dimana tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan pengidentifikasian sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

3.2.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Solusi

Pandemi Covid- 19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan instruksi Presiden kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Daerah untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran yang digunakan dalam program percepatan penanggulangan covid-19 menyebabkan anggaran Dinas Perhubungan Kota Batam secara garis besar juga mengalami penurunan. Ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan kinerja Dinas.

Dengan sasaran kinerja sebagai alat pengukuran kinerja dapat kita ketahui pencapaian kinerja Dinas Pehubungan Kota Batam sebagai berikut:

1. Terlaksananya pelayanan parkir dan transportasi jalan yang aman dan nyaman, dengan indikator :
   - Persentase Titik lokasi parkir yg sudah dikelola

     Indikator ini hanya mencapai realisasi sebesar 82% melalui *program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* dengan kegiatan berupa mencari titik lokasi parkir baru untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
   - Tingkat Keamanan dan kenyamanan transportasi Jalan

     Indikator ini hanya mencapai 65% melalui *program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
2. Tersedianya Transportasi massal yang berkesinambungan dan terjangkau oleh masyarakat, dengan indikator Persentase layanan angkutan darat dan laut, namun pencapaian realisasi dari indikator ini hanya 58%. Hal ini disebabkan oleh mewabahnya Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 sehingga Pemerintah menetapkan aturan untuk membatasi jumlah penumpang pada layanan angkutan umum. Sehingga layanan angkutan Trans Batam mengalami penurunan secara drastis.
3. Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Darat dan Laut, dengan indikator Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun, target indikator ini hanya mampu mecapai 63%, karena kebutuhan dana pada penanganan Covid-19 sehingga banyak target-target pekerjaan tidak dapat dilaksanakan.

Sama hal nya dengan indikator Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpelihara, akibat sebagian besar dana APBD di fokuskan untuk penanganan covid-19 sehingga indikator ini hanya mencapai realisasi sebesar 65%.

4. Tersedianya akses ke wilayah hinterland, dengan indikator :
   - Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran, pencapaian indikator ini melalui *program Pengelolaan Pelayaran* sebesar 89%, akibat karena kebutuhan untuk penanganan Covid 19 pada Tahun 2021 ini Dinas Perhubungan tidak dapat melaksanakan pembangunan dermaga hanya melaksanakan rehab dermaga.
   - Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota, masih melalui *program Pengelolaan Pelayaran,* realisasi indikator ini sudah melebihi 100% melalui kegiatan pembangunan kapal yang dilaksanakan sampai 2018 sudah mencapai atau melebihi target renstra.

3.2.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM)

1. Dana

Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan guna pencapaian target kinerja aspek keuangan mempunyai pengaruh yang tinggi. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai.

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Perhubungan Kota Batam mendapat anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 52.620.450.358,00 telah dapat direalisasikan sebesar Rp47.011.080.846,00 dengan persentase sebesar 89,34%. Dengan besaran anggaran tersebut, upaya pencapaian target kinerja yang mengacu pada indikator kinerja Renstra 2016-2021 secara keseluruhan dapat dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Batam .

TABEL III.7
PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2021
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET 2021	REALISASI 2021	ANGGARAN	REALISASI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Terlaksananya pelayanan parkir dan transportasi jalan yang aman dan nyaman	Persentase Titik lokasi parkir yg sudah dikelola	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	87%	82%	28.028.577.268	24.696.398.471
		Tingkat Keamanan dan kenyamanan transportasi Jalan		90%	65%		
2	Tersedianya Transportasi massal yang berkesinambungan dan terjangkau oleh masyarakat	Persentase layanan angkutan darat dan laut		65%	38%		
3	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Darat dan Laut	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terbangun		65%	41%		
		Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpelihara		60%	39%		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET 2021	REALISASI 2021	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Tersedianya akses ke wilayah hinterland	Tersedianya Dermaga penyeberangan pada Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	Program Pengelolaan Pelayaran	100%	89%	2.623.131.013	2.576.404.198	98%
		Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten/Kota		100%	133%			

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya serapan anggaran/pembiayaan untuk setiap program dan kegiatan pada masing- masing indikator kinerja dirasa telah cukup/efisien dalam pencapaian target kinerja. Namun demikian, dalam upaya pencapaian kinerja yang lebih baik, perlu diimbangi dengan pembiayaan yang lebih baik pula

2. Sarana dan Prasarana

Merupakan aspek yang juga tidak kalah pentingnya dalam pencapaian kinerja. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu aspek pendukung kelancaran penyelenggaraan program dan kegiatan guna pencapaian kinerja yang baik. Adapun sarana dan prasarana yang digunakan Dinas Perhubungan Kota Batam dalam pelaksanaan program dan kegiatan meliputi :

2.1 Tempat

Ruang Rapat/ Aula Dinas Perhubungan Kota Batam. Ruang tersebut sebagai sarana penyelenggaraan kegiatan rapat – rapat teknis, pembinaan, penerimaan tamu kedinasan dari dalam maupun luar

daerah. Untuk kegiatan skala besar (yang membutuhkan tempat./ ruangan yang lebih besar) Dinas Perhubungan Kota Batam menggunakan aula Dinas Perhubungan Kota Batam sebagai tempat Penyelenggaraan kegiatan.

2.2 Inventaris lain-lain (Meja, Kursi, Komputer, Printer, Proyektor, Kendaraan Dinas Operasional, Kendaraan Derek dll)

Yang digunakan sebagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan rutin maupun acara rapat teknis, mauppun pelaksanaan pengawasan ketertiban dan razia.

Dengan pemanfaatan /penggunaan sarana prasarana tersebut, kelancaran penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Batam dapat tercapai sehingga mendukung pencapaian kinerja.

3. Sumber Daya manusia (SDM)

Kuantitas SDM yang tentunya diimbangi dengan kualitas, menjadi salah satu aspek penting pendukung tercapainya pencapaian target kinerja. Dengan jumlah personil sebanyak 313 orang terdiri dari ASN dan Non ASN Dinas Perhubungan Kota Batam memaksimalkan keterlibatan masing-masing personil tersebut dalam setiap penyelenggaraan kegiatan baik di internal maupun di eksternal kantor, sesuai dengan tugas, fungsi dan posisi masing-masing.

3.2.3. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan Pencapaian Kinerja

Realisasi capaian kinerja pada tahun 2021 pada Dinas Perhubungan Kota Batam melalui program dan kegiatan yang menunjang pencapaian penetapan /perjanjian kinerja di awal tahun. Program dan kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- ***Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan***

  Pada program ini dilaksanakan enam kegiatan pendukung yaitu:

  1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

     Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan, selama tahun 2021, Dinas Perhubungan Kota Batam telah membangun fasilitas keselamatan jalan berupa :

     a. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas sebanyak 100 Unit disejumlah titik di kota Batam yaitu :

        - Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Rambu Perintah Memasuki Bagian Jalan Tertentu" sebanyak 7 unit yaitu 3 unit pada ruas jalan Jl. Raja Ali Kelana (dari arah UNIBA menuju Cikitsu) Batam Kota, 2 unit pada ruas jalan Simpang Tobing Batu Aji, 1 Unit pada ruas jalan Simpang Base Camp Batu Aji, 1 Unit pada ruas jalan Jalan Raya Pelabuhan Kabil.
        - Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Tempat berbalik arah bagi kendaraan

bermotor maupun tidak bermotor" sebanyak 5 unit yaitu 3 unit pada ruas jalan Jl. Raja Ali Kelana (dari arah UNIBA menuju Cikitsu) Batam Kota, 1 Unit pada ruas jalan Jl. Raja Ali Kelana (dari arah Cikitsu menuju UNIBA) Batam Kota, 1 Unit pada ruas jalan Jl. Selasih (dari arah Jalan Raja Isa menuju Simpang KDA) Batam Kota.

- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Wajib mengikuti arah ke kiri" sebanyak 1 unit pada ruas jalan Jl. Raja Ali Kelana (dari arah Cikitsu menuju UNIBA) Batam Kota.
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Petunjuk lokasi Masjid" sebanyak 3 unit yaitu 1 unit pada ruas jalan Jl. Raja Ali Kelana (dari arah Cikitsu menuju UNIBA) Batam Kota, 1 unit pada ruas jalan Jl. Selasih (dari arah Jalan Raja Isa menuju Simpang KDA) Batam Kota, 1 unit pada ruas jalan Jalan Raja Isa menuju Simpang KDA Batam Kota.
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Petunjuk lokasi Gereja" sebanyak 1 unit pada ruas jalan Jl. Raja Ali Kelana (dari arah UNIBA menuju Cikitsu) Batam Kota.
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Petunjuk lokasi Sekolah" sebanyak 4 unit yaitu 1 unit pada Sekolah Budi Dharma Batam Kota,

1 unit pada Sekolah Juwita Batam Kota, 1 unit pada Jalan Abulyatama menuju Jalan Cikitsu Batam Kota, dan 1 unit pada Jalan Cikitsu menuju Jalan Abulyatama Batam Kota.

- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Rambu Penyeberangan" sebanyak 2 unit yaitu pada lokasi Ruang Bermain Anak, Simpang Tembesi Sagulung.
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Rambu Parkir" sebanyak 5 unit yaitu 3 unit pada lokasi kantor Polda Bhayangkara Nongsa dan 2 unit pada ruas jalan Jalan raya Pelabuhan Kabil.
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Rambu Parkir Disabilitas" sebanyak 3 unit yaitu 1 unit pada lokasi kantor Polda Bhayangkara Nongsa dan 2 unit pada lokasi Ruang Bermain Anak, Simpang Tembesi Sagulung.
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bemotor" sebanyak 6 unit yaitu 2 unit pada ruas jalan Jl. Raja Ali Kelana (dari arah UNIBA menuju Cikitsu) Batam Kota, 2 Unit pada ruas jalan Simpang Tobing Batu Aji, 1 Unit pada ruas jalan Simpang Base Camp Batu Aji, 1 Unit pada ruas jalan Jalan raya Pelabuhan Kabil.

- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Dilarang Parkir" sebanyak 1 unit pada lokasi kantor Polda Bhayangkara Nongsa.
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Larangan berjalan terus wajib berhenti sesaat" sebanyak 2 unit yaitu 1 unit pada ruas jalan Jalan Abulyatama menuju Cikitsu Batam Kota dan 1 unit pada ruas jalan Jl. Selasih (dari arah Jl. Raja Isa menuju simpang KDA) Batam Kota.
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Peringatan Turunan Landai" sebanyak 10 unit yaitu 1 unit pada ruas jalan sekitar perumahan Anggrek Mas (dari arah Simpang Kara menuju Simpang Orchid) Batam Kota, 2 unit pada ruas jalan Jl. Selasih (dari arah Jl. Raja Isa menuju simpang KDA) Batam Kota, 2 unit pada ruas jalan Jalan Abulyatama menuju Cikitsu Batam Kota, 1 unit pada ruas jalan Cikitsu menuju Jalan Abulyatama Batam Kota, 2 unit pada ruas jalan Jl. Raja Ali Kelana (dari arah UNIBA menuju Cikitsu) Batam Kota, dan 2 unit pada ruas jalan Jl. Raja Ali Kelana (dari arah Cikitsu menuju UNIBA) Batam Kota.
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Peringatan Tanjakan Landai" sebayak 9 unit yaitu 1 unit pada ruas jalan depan kantor BNN (dari arah Simpang Orchid menuju Simpang Kara)

Batam Kota, 2 unit pada ruas jalan Jl. Selasih (dari arah Jl. Raja Isa menuju simpang KDA) Batam Kota, 1 unit pada ruas jalan Jalan Abulyatama menuju Cikitsu Batam Kota, 1 unit pada ruas jalan Jalan Cikitsu menuju Jalan Abulyatama Batam Kota, 2 unit pada ruas jalan Jl. Raja Ali Kelana (dari arah UNIBA menuju Cikitsu) Batam Kota, dan 2 unit pada ruas jalan Jl. Raja Ali Kelana (dari arah Cikitsu menuju UNIBA) Batam Kota.

- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Tikungan ke Kiri" sebanyak 5 unit yaitu 1 unit pada ruas jalan sebelum Apartemen Queen Victory (Simpang Orchid menuju Simpang Kara), 1 unit pada ruas jalan sekitar perumahan Anggrek Mas (dari arah Simpang Orchid menuju Simpang Kara) Batam Kota, 1 unit pada ruas jalan Jalan Abulyatama menuju Cikitsu Batam Kota, 1 unit pada ruas jalan Jalan Cikitsu menuju Jalan Abulyatama Batam Kota, 1 unit pada ruas jalan Jl. Raja Ali Kelana (dari arah UNIBA menuju Cikitsu) Batam Kota.
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Tikungan ke Kanan" sebanyak 8 unit yaitu 1 unit pada ruas jalan sekitar perumahan Anggrek Mas (dari arah Simpang Kara menuju Simpang Orchid) Batam Kota, 1 unit 50 meter setelah Apartemen Queen Victory Batam Kota, 2 unit pada ruas jalan Jalan

Abulyatama menuju Cikitsu Batam Kota, 2 unit pada ruas jalan Jalan Cikitsu menuju Jalan Abulyatama Batam Kota, 2 unit pada ruas jalan Jl. Raja Ali Kelana (dari arah Cikitsu menuju UNIBA) Batam Kota.

- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Peringatan Persimpangan Tiga Sisi Kiri (Prioritas Lurus)" sebanyak 1 unit yaitu pada lokasi Apartemen Queen Victory (Simpang Kara menuju Simpang Orchid) Batam Kota.
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Peringatan Persimpangan Sisi Kanan (Prioritas Lurus)" sebanyak 1 unit yaitu pada lokasi Apartemen Queen Victory Batam Kota.
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Peringatan hati-hati" sebanyak 16 unit yaitu 1 unit pada ruas jalan sekitar perumahan Anggrek Mas (dari arah Simpang Orchid menuju Simpang Kara) Batam Kota, 1 unit pada ruas jalan Simpang 4 Kara (dari arah Simpang Orchid menuju Simpang Kara) Batam Kota, 1 unit pada ruas jalan Jl. Ahmad Yani (Simpang Kara menuju Simpang Orchid) Batam Kota, 1 unit pada ruas jalan sekitar perumahan Anggrek Mas (dari arah Simpang Kara menuju Simpang Orchid) Batam Kota, 1 unit pada ruas jalan Simpang Orchid Park (dari arah Simpang Kara menuju Simpang Orchid) Batam Kota, 3

unit pada ruas jalan Jl. Selasih (dari arah Jl. Raja Isa menuju simpang KDA) Batam Kota, 2 unit pada ruas jalan Jalan Abulyatama menuju Cikitsu Batam Kota, 2 unit pada ruas jalan Jalan Cikitsu menuju Jalan Abulyatama Batam Kota, 1 unit pada ruas jalan Jl. Raja Ali Kelana (dari arah UNIBA menuju Cikitsu) Batam Kota, 1 unit pada ruas jalan Jl. Raja Ali Kelana (dari arah Cikitsu menuju UNIBA) Batam Kota, 2 unit pada ruas jalan Jalan raya Pelabuhan Kabil.

- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Peringatan persimpangan simpang sisi kiri" sebanyak 1 unit pada ruas jalan Jl. Raja Ali Kelana (dari arah Cikitsu menuju UNIBA) Batam Kota.
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Persimpangan empat" sebanyak 4 unit yaitu 1 unit pada ruas jalan sekitar perumahan Anggrek Mas (dari arah Simpang Orchid menuju Simpang Kara) Batam Kota, 1 unit pada ruas jalan Simpang 4 Kara (dari arah Simpang Orchid menuju Simpang Kara) Batam Kota, 1 unit pada ruas jalan sekitar perumahan Anggrek Mas (dari arah Simpang Kara menuju Simpang Orchid) Batam Kota, 1 unit pada ruas jalan Jl. Ahmad Yani (Simpang Kara menuju Simpang Orchid) Batam Kota.
- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Persimpangan Tiga Tipe T" sebanyak 3

unit yaitu 1 unit pada ruas jalan Jl. Selasih (dari arah Jl. Raja Isa menuju simpang KDA) Batam Kota, 1 unit pada ruas jalan Jalan Cikitsu menuju Jalan Abulyatama Batam Kota, 1 unit pada ruas jalan Jl. Raja Ali Kelana (dari arah UNIBA menuju Cikitsu) Batam Kota.

- Rambu Lalu Lintas Darat standar tinggi 3 meter dengan jenis rambu "Peringatan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas" sebanyak 2 unit yaitu 1 unit pada ruas jalan Simpang 4 Kara (dari arah Simpang Orchid menuju Simpang Kara) Batam Kota dan 1 unit pada ruas jalan Jl. Ahmad Yani (Simpang Kara menuju Simpang Orchid) Batam Kota.

b. Pemasangan Rambu Type F sebanyak 6 Unit disejumlah titik di kota Batam, pada ruas jalan depan Laluan madani arah ke Sekupang sebanyak 1 unit, pada ruas jalan Simpang Laluan Madani sebanyak 1 unit, pada ruas jalan Simpang Baloi Centre (simpang 4 Baloi Centre dari arah Jl. Duyung ke Jl. Bunga Raya) sebanyak 1 unit, Simpang Baloi Centre (simpang 4 Baloi Centre dari arah Jl. Pembangunan ke arah depan Perumahan Baloi Mas) sebanyak 1 unit, Simpang Sei Harapan ke arah Tiban sebanyak 2 unit.

c. Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) sebanyak 5 Unit disejumlah titik di kota Batam yaitu 1 unit pada ruas jalan depan Kepri Mall Batam Kota di Simpang Kabil dari arah Batu Aji, 1 unit pada ruas jalan Jl. Sudirman dekat Simpang Kabil dari arah Nagoya, 1 unit pada ruas jalan Jl. Sudirman dekat kantor Poltabes Barelang dari arah Simpang Kabil, 1 unit pada ruas jalan Jl. Raja H. Fisabilillah depan Perumahan Kembang Sari, 1 unit pada ruas jalan Jl. Yos Sudarso dari arah simpang Laluan Madani depan kantor *Showroom Daihatsu.*

d. Pemasangan rambu-rambu Papan Nama Jalan sebanyak 50 Unit disejumlah titik di kota Batam yaitu :

- 3 unit "Jl. Islamic Centre" pada ruas jalan Simpang 3 DPRD Kota Batam – jalan baru Batam Kota;
- 3 unit "Jl. Sanggam Bertuah" pada ruas jalan kantor Samsat Batam Centre samapi dengan simpang Bukit Clara Batam Kota;
- 4 unit "Jl. Daeng Kamboja" pada ruas jalan Hotel 01 Batam Kota;

- 4 unit "Jl. Raja M. Tahir" pada ruas jalan depan Hotel Harmoni One sampai dengan Sekolah Global Batam Kota;
- 3 unit "Jl. Dang Merdu" pada ruas jalan simpang 3 Sekolah Yos Sudarso sampai simpang 3 Perumahan Seruni Batam Kota;
- 1 unit "Jl. Daeng Perani" pada ruas jalan kantor BRI Batam Kota;
- 4 unit "Jl. Gurindam" pada ruas jalan samping kantor Batam Pos Batam Kota;
- 2 unit "Jl. Raja Husin" pada ruas jalan simpang Mega Legenda ke arah Jl. Raja Isa Batam Kota;
- 2 unit "Jl. Lancang Kuning" pada ruas jalan perumahan Legenda Malaka ke arah kantor Lurah Baloi Permai Batam Kota;
- 2 unit "Jl. Selembayung" pada ruas jalan simpang Gereja lokasi Legenda Malaka menuju simpang Gereja di Jl. Raja Isa Batam Kota;
- 2 unit "Jl. Selasih" pada ruas jalan simpang pertokoan KBC menuju simpang RS Elizabeth Batam Kota;
- 4 unit "Jl. Raja Isa" pada ruas jalan sekitar simpang Sumatera Expo kea rah simpang perumahan KDA Batam Kota;
- 2 unit "Jl. Tengku Sulung" pada ruas jalan depan SMAN 3 menuju jalan ke arah Perumahan Dotamana Batam Kota;

- 2 unit "Jl. Hang Nadim" pada ruas jalan Simpang Bandara menuju SMAN 3 Batam Kota;
- 4 unit "Jl. Raden Patah" pada ruas jalan simpang 3 Polsek Lubuk Baja ke arah simpang 3 Apartemen Harmoni Lubuk Baja;
- 2 unit "Jl. Imam Bonjol" pada ruas jalan simpang 3 Apartemen Harmoni menuju simpang 4 Mc Donal Lubuk Baja;
- 6 unit "Jl. Laksamana Bintan" pada ruas jalan simpang Hotel Kaliban menuju ke arah simpang terowongan Batam Kota.

e. Pemasangan Cermin Tikungan sebanyak 4 Unit disejumlah titik di kota Batam yaitu 2 unit di daerah Bukit Senyum, 1 unit didepan kantor Dinas Perhubungan dan 1 unit di kelurahan Patam Lestari.

f. Pembangunan Canstin sepanjang 200 meter di lokasi depan Lapas Wanita sampai dengan depan kantor Dinas Perhubungan.

g. Pembangunan Shelter/Halte sebanyak 2 unit yaitu depan pertokoan Windsor Central, Jl. Pembangunan Lubuk Baja dan Jl. Fisabilillah depan Perumahan Raflesia Batam Kota.

h. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas terdiri dari pemeliharaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ) yang tersebar di Kota Batam sebanyak 5 unit, Rambu Lalu Lintas Darat Standar yang tersebar di Kota Batam sebanyak 20 unit dan Papan Nama Jalan yang tersebar di Kota Batam sebanyak 30 unit.

2. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

   Kegiatan ini melaksanakan operasional dan pengawasan Juru Parkir Tepi Jalan Umum di lapangan atau dilokasinya masing-masing, dalam hal pengawasan UPT Pelayanan Parkir membentuk Korlap (Koordinator Lapangan) per kecamatan. Korlap bertugas mengawasi dan menempatkan Juru Parkir di titik lokasi parkir. Sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah lokasi titik parkir yang telah dikelola oleh Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perhubungan Kota Batam sebanyak 542 titik lokasi parkir.

3. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

   Kegiatan ini melaksanakan operasional Pengujian Kendaraan Bermotor di Bidang Angkutan. Pengadaan sarana dan prasarana pengujian, pengadaan bukti lulus uji berupa *smart card* yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor. Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan setiap hari kerja di Dinas Perhubungan Kota Batam terhadap kendaraan wajib uji yaitu kendaraan angkutan orang dan barang yang bertujuan untuk keselamatan pengguna jalan. Pelaksanaan pengujian yang dilakukan oleh tim pengujian Dinas Perhubungan yaitu :

- Uji emisi gas buang
- Pemeriksaan bagian bawah kendaraan
- Uji daya pancar lampu
- Uji kincup roda depan
- Uji sistem pengereman
- Uji akurasi alat penunjuk kecepatan

4. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

   Pada kegiatan ini Dinas Perhubungan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan lampu lalu lintas atau *traffic Light* dan pengecatan marka jalan, pelaksnaan pekerjaan pada tahun 2021 meliputi :

   a. Pembangunan Lampu Lalu Lintas (*Traffic Light*) 3 simpang sebanyak 1 lokasi di persimpangan pertokoan Fanindo dan MAN 2 Batu Aji.

b. Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam sebanyak 36 Simpang di kota Batam, 29 Simpang sudah ATCS (Area Traffic Control System) dan 7 Simpang masih belum ATCS.

c. Pengecatan Zebra Cross sepanjang 650 m^2 yaitu 147 m^2 pada lokasi simpang Kara Batam Kota, 65 m^2 pada lokasi depan PT. Sinometal Batam Kota, 114 m^2 pada lokasi simpang Planet Holiday Lubuk Baja, 105 m^2 pada lokasi simpang Mc Donalds Sei Jodoh, 43 m^2 pada lokasi simpang Vihara Budhi Bhakti Lubuk Baja, 36 m^2 pada lokasi depan BCS Mall Lubuk Baja, 9 m^2 pada lokasi depan SDN 005 Sei Beduk, 11 m^2 pada lokasi depan SMPN 27 Sagulung, 38 m^2 pada lokasi depan Nagoya Hill Mall Lubuk Baja, 12 m^2 pada lokasi simpang jalan masuk SDN 002 Batu Aji, 12 m^2 pada lokasi simpang jalan masuk SDN 008 Batu Aji, 12 m^2 pada lokasi simpang jalan masuk SMPN 26 Batu Aji, 12 m^2 pada lokasi simpang Perumahan Buana View Batu Aji, 12 m^2 pada lokasi depan SMPII Hidayatullah Batu Aji, 12 m^2 pada lokasi depan SDIT Darussalan dan SDN 001 Batu Aji, 11 m^2 pada lokasi depan SDN 021 Sagulung.

d. Pengecatan Pita Penggaduh sepanjang 160 m^2 yaitu 18 m^2 pada lokasi sebelum Vihara Bhudi Bhakti (dari arah Nagoya), 20 m^2 pada lokasi sebelum BCS Mall (dari arah Indomobil), 15 m^2 pada lokasi Jl. Tiban Koperasi (dari arah SMPN 20), 22 m^2 pada lokasi depan Sekolah SMPN 27 Sagulung, 15 m^2 pada lokasi sebelum Tiban Center (dari arah sekupang), 15 m^2 pada lokasi sebelum Perum Taman Sari (dari arah Batam Center), 16 m^2 pada lokasi sebelum PT. Sinometal (dari arah Pemko Batam), 41 m^2 pada lokasi sebelum PT. Sinometal (dari arah Batu Aji).

5. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

   Kegiatan ini melaksanakan Razia terhadap kendaraan angkutan orang dan barang terkait dengan pemeriksaan kartu lulus uji kendaraan bermotor dan pengawasan ketertiban di jalan raya. Tahun 2021 Dinas Perhubungan melaksanakan 10 kali Razia dan 30 kali pengawasan ketertiban lalu lintas.

6 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

   Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPT Pelayanan Transportasi Dinas Perhubungan Kota Batam yang selama tahun 2021 melaksanakan operasional Bus Trans Batam dan Bus Sekolah untuk siswa-siswi di wilayah hinterland.

   Pengelolaan Bus Trans Batam dan Bus Sekolah sejak Desember 2013 dikelola oleh UPT Pelayanan Jasa Transportasi, berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor

: 30 Tahun 2013 tanggal 22 Mei 2013 tentang Pembentukan UPT Pelayanan Jasa Transportasi pada Dinas Perhubungan Kota Batam.

Untuk tahun 2021 jumlah penumpang Trans Batam yang terangkut sebanyak 1.172.264 dari 8 (delapan) koridor yang tersedia, dengan rute sebagai berikut :

1. Koridor Sekupang – Batam Centre yang melewati Sei Harapan – Tiban - UIB - Simp. Sei Panas - Kantor Walikota - Mega Mall
2. Koridor Tanjung Uncang – Batam Centre yang melewati Simpang Sagulung - Fanindo - Simpang Base Camp - Batu Aji - Simpang Barelang - Muka Kuning - Kepri Mall - Kantor Walikota - Mega Mall
3. Koridor Sekupang – Jodoh yang melewati Sei Harapan - Tiban - UIB - Simp. Baloi - Penuin - Nagoya - Simp. Mc Donald - Terminal Jodoh - DC Mall - Pasar Induk
4. Koridor Sagulung – Sekupang yang melewati Pelabuhan Sagulung - Fanindo - Simpang Base Camp - Marina - Tanjung Riau - Sei Harapan
5. Koridor Tanjung Piayu – Batam Centre yang melewati Piayu Laut - Simpang Bagan - Muka Kuning - Panbil - Kepri Mall - Kantor Walikota
6. Koridor Jodoh – Batam Centre yang melewati Harbourbay - Batu Ampar - Sei Panas – BNI
7. Koridor Nongsa – Batam Centre yang melewati Teluk Mata Ikan - Kapling Sambau - Simpang Batu Besar - Simpang

Bandara - SMU 3 - Simpang Dotamana - Simpang Kantor Camat Kota Batam - Simpang KDA - Mega Mall

8. Koridor Nongsa – Jodoh yang melewati Batu Besar - Sudirman - Raden Patah - *Nagoya Hill*

Untuk tahun 2021 operasional Bus Sekolah selama lebih kurang 275 hari telah mengangkut sebanyak 371.840 siswa yang tersebar di Kecamatan Galang. Bus Sekolah yang tersedia di UPT Pelayanan Transportasi sebanyak 9 Unit untuk melayani 8 (delapan) Rute sebagai berikut:

1. Rute I : Dishub - Tembesi - Sijantung - Pulau Nguan - Air Lingka –Tanjung Kertang
2. Rute II : Dishub - Tembesi - Kampung Baru – Tanjung Kertang
3. Rute III : Dishub - Tembesi - Tg. Kertang - Sembulang – Sijantung
4. Rute IV : Dishub - Tembesi - Tg. Kertang - Cate – Tanjung Kertang
5. Rute V : Dishub - Tembesi - Setokok – Sijantung
6. Rute VI : Dishub - Tembesi – Tanjung Kertang - Monggak – Sijantung

7. Rute VII : Dishub - Dapur 6 – Tanjung Banun - Sei Buluh – Sijantung
8. Rute VIII : Dishub - Tembesi - Sijantung – Tanjung Kertang

- ***Program Pengelolaan Pelayaran***

Pada program ini dilaksanakan 2 (dua) kegiatan pendukung yaitu:

1. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini juga dilaksakan oleh UPT Pelayanan Transportasi yang melaksanakan angkutan laut untuk masyarakat di wilayah hinterland. Transportasi laut yang tersedia sebanyak 1 Unit Kapal (KM Sri Lengkang) dan 3 Unit Speed Boat (Sri Jaloh, Sri Mecan dan Sri Nipah), yang beroperasi seminggu

selama 3 (tiga) hari yaitu pada Senin, Rabu dan Sabtu dengan rute sebagi berikut :

1. Rute KM Sri Lengkang : Pulau Jaloh - Cengkui - Aweng - Selat nenek - Temoyong - Pulau Seraya - Pulau Buluh – Sagulung
2. Speed Boat Galang - Rute I : Pulau Karas - Pulau Mubut – Sembulang
3. Speed Boat Galang - Rute II : Pulau Sembur - Pulau Nanga - Teluk Nipah - Pulau Korek - Tanjung Pengapit - Kampung Baru - Air Lingke
4. Speed Boat Galang - Rute III : Air Saga - Pulau Abang – Cakang

2. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.

   Pada tahun 2021 Dinas Perhubungan tidak ada pelaksanaan pembangunan dermaga, mengingat dana yang dibutuhkan untuk membangun dermaga diatas Rp 2 Milyard, tentunya alokasi dana tersebut di tahun 2021 masih digunakan untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas *COVID-19,* dan

dermaga yang telah terbangun selama peride rentra 2016-2021 adalah sebanyak 8 unit yang terdiri dari 7 (tujuh) unit dermaga dan 1 (satu) unit ponton.

TAHUN	DERMAGA	PONTON	LOKASI
2016	3	-	Teluk Sunti, Pulau Aweng, Telaga Punggur
2017	2	-	Pulau Puteri, Subang Mas
2018	1	1	Air Saga, Pecong
2019	1	-	Sekanak Raya (Belakang Padang)
2020	-	-	
2021	-	-	
JUMLAH	**7**	**1**	

Namun untuk tahun 2021 Dinas Perhubungan melakukan Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut pada Pos Pelabuhan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang, Dermaga Ponton di lokasi Pulau Buluh Kecamatan Bulang, Pelantar Beton pada 3 lokasi yaitu Pelantar Beton Sagulung, Pelantar Beton Galang Baru Kecamatan Galang, dan Pelantar Beton Pulau Air Kelurahan Batu Legong Kecamatan Bulang.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila di dukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana anggaran tersebut merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan. Pada tahun anggaran 2021 Dinas Perhubungan Kota Batam mendapat anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 52.620.450.358,00 telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 47.011.080.846,08 dengan persentase sebesar 89,34%. Adapun rincian penyerapan anggaran untuk setiap program dan kegiatan dijabarkan sebagai berikut :

TABEL III.8
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN 2021	REALISASI Rp	%
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**21.968.742.077,00**	**19.738.278.177,44**	**90%**
1.1	KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.423.029.896,00	10.818.767.009,00	95%
1.2	KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah	346.100.000,00	324.022.400,00	94%
1.3	KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.628.719.900,00	2.454.590.789,00	93%
1.4	KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.400.000,00	190.615.328,00	89%
1.5	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	973.760.664,00	858.567.295,00	88%
1.6	KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD	6.382.731.617,00	5.091.715.356,44	80%
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**28.028.577.268,00**	**24.696.398.470,64**	**88%**
2.1	KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.308.602.126,00	1.156.065.079,00	88%
2.2	KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.445.964.000,00	1.227.044.880,00	85%
2.3	KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.177.113.000,00	1.064.692.500,00	90%
2.4	KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa LaLu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	6.357.739.822,00	4.551.989.417,64	72%
2.5	KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	152.000.000,00	125.000.000,00	82%
2.6	KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	17.587.158.320,00	16.571.606.594,00	94%
3.	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**2.623.131.013,00**	**2.576.404.198,00**	**98%**
3.1	KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	1.696.319.000,00	1.655.779.300,00	98%
3.2	KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	926.812.013,00	920.624.898,00	99%
		52.620.450.358,00	**47.011.080.846,08**	**89,34%**

BAB IV
PENUTUP

1. KESIMPULAN

Secara umum beberapa tahun terakhir Dinas Perhubungan Kota Batam telah memenuhi hampir seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Fungsi utama diharapkan dapat dijalankan oleh Dinas Perhubungan dalam hal pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan terutama dalam transportasi dan fasilitas keselamatan.

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah wabah global yang berdampak buruk pada dimensi manusia dan sosial. Covid-19 berdampak besar hampir di semua aspek kehidupan termasuk sektor transportasi karena diberlakukannya pembatasan jumlah penumpang angkutan umum. Dengan kondisi tersebut beberapa realisasi kinerja pada tahun 2021 tidak memenuhi target yang diharapkan.

Laporan ini merupakan suatu perwujudan dan dukungan sistem administrasi yang dapat memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diberikan untuk pengelolaan sumber daya aparatur Dinas Perhubungan Kota Batam.

Keberhasilan dan atau kegagalan Laporan Akuntabilitas ini digunakan sebagai alat umpan balik untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pada masa yang akan datang.

2. SARAN

Untuk lebih meningkatkan dan mengefektifkan kegiatan di Dinas Perhubungan masih diperlukan upaya-upaya yang berkelanjutan dan mengoptimalkan kerjasama dengan instansi terkait dalam mendukung keselamatan berlalu lintas dan kenyamanan fasilitas transportasi.

Pengembangan transportasi yang aman, nyaman dan berkesinambungan merupakan tugas Dinas Perhubungan Kota Batam yang masih tertunda, masih diperlukan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan transportasi yang modern di Kota Batam.

Dalam hal evaluasi data kinerja, masih perlu dikembangkan suatu sistem yang mendukung mulai dari perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan secara sistematis. Kerjasama dan dukungan semua pihak baik diinternal OPD maupun eksternal OPD sangat diharapkan, agar pengukuran kinerja yang diharapkan dapat tercapai.